



► **PENERIMAAN SISWA BARU**

ORI Masih Temukan Masalah di PPDB SMP

Herliambang Jati Kusumo, Uli Febrinri & Lugas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY masih menemukan sejumlah permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP.

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Mashuri mengatakan temuan terakhir salah seorang siswa disabilitas kesulitan mendaftarkan PPDB SMP. Setelah ditelusuri kendala yang dialami siswi tersebut karena Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY terlambat mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).

"Probleminya bukan karena disabilitas. Namun karena SKHUN belum komplet. Semua sekolah di Kota sudah inklusif jadi tidak ada alasan menolak difabel. Setelah dicek SMPN 13 Jogja juga kuota masih ada. Prinsipnya jadi pembelajaran juga masalah SKHUN ini," ujar Budhi, Rabu (3/7).

Menindaklanjuti masalah itu sendiri, karena pendaftaran *online* telah ditutup, ORI DIY telah berkomunikasi dengan kepala sekolah dan Disdikpora Kota Jogja. "Disdikpora Kota membuka kemungkinan pendaftaran *online* tetapi harus melalui Disdikpora Kota yang akan dibantu oleh petugas input data. Besok pagi [Kamis (4/7)] pukul 08.00 WIB dijadwalkan ke dinas," ujarnya.

Dikatakannya, ORI DIY memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini, karena berkenaan dengan keberpihakan afirmatif yang perlu diberikan negara kepada penyandang disabilitas. Saat disinggung apakah

POTRET PENDAFTAR SMP NEGERI JALUR KMS

Salah satu jalur dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Jogja adalah KMS. Tidak semua pendaftar di SMP negeri sesuai daya tampung yang disediakan.

	SMPN 1	SMPN 2	SMPN 3	SMPN 4	SMPN 5	SMPN 6	SMPN 7	SMPN 8
○ Kuota	27	24	20	17	13	24	20	32
👤 Pendaftar	30	49	21	18	7	27	26	23
▲ Nilai Tertinggi	244,50	248,20	220,20	250,60	255,90	240,90	240,200	262,90
▼ Nilai Terendah	179,00	201,70	188,60	187,40	160,70	181,80	198,00	127,70

	SMPN 9	SMPN 10	SMPN 11	SMPN 12	SMPN 13	SMPN 14	SMPN 15	SMPN 16
○ Kuota	20	17	14	17	10	14	34	24
👤 Pendaftar	26	21	22	20	13	16	61	49
▲ Nilai Tertinggi	239,70	246,30	225,30	236,10	200,40	191,20	244,00	244,30
▼ Nilai Terendah	189,30	187,40	195,20	185,50	190,40	179,70	189,10	200,90

○ Kuota 👤 Pendaftar ▲ Nilai Tertinggi ▼ Nilai Terendah

Sumber: yogya.siap-ppdb.com

masih ada siswa lain yang memiliki masalah sama, Budhi mengatakan sementara baru itu. Meski begitu ORI DIY masih membuka aduan terkait dengan PPDB.

Selain permasalahan SKHUN yang terlambat keluar, ia juga mengatakan sejumlah kendala kaitannya dengan sistem juga terjadi di Sleman. Dalam sistem tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis). Sehingga calon siswa tidak bisa mendaftar secara *online*. Dicontohkannya misal di juknis setiap kelurahan/desa dialokasikan beberapa sekolah zona satu, di sistem tidak muncul, sekolahnya zona dua semua. Di juknis setiap calon siswa bisa memilih tiga sekolah, di sistem hanya satu sekolah.

Alternatif mengatasi masalah tersebut, kata Budhi, pendaftar harus ke sekolah atau ke dinas untuk dibantu teknis, karena ada data yang harus diinput ulang. "Ya teratasi hanya beberapa tidak bisa daftar mandiri harus dibantu teknisnya. Itu masalahnya kemarin juga kurang sosialisasi," ucapnya.

Pengamat Pendidikan UNY Prof. Wuryadi mengungkapkan untuk pendaftaran dengan sistem *online* merupakan penyesuaian perkembangan teknologi digital.

► Halaman 6

Instansi: _____

1. _____ Nedatif Amat Seceera Untuk Ditanggapi

ORI Masih...

"Hanya saja membutuhkan perangkat yang sesuai. Tampaknya juga ada kelemahan secara praktis pada pengelolannya," ujarnya.

Pendaftar, dikatakan Wuryadi, seharusnya juga sudah paham teknologi. Namun pada praktiknya masih ada yang gagap teknologi, sehingga menjadi kendala. Dalam hal ini paling berkepentingan dinas untuk memberi tuntunan.

Sementara untuk sistem zonasi, dikatakannya memang usulan dari Dewan Pendidikan DIY, untuk menyelesaikan masalah transportasi, kepadatan arus. Selain juga untuk pemerataan kualitas sekolah.

"Pemerataan kualitas itu juga harus terjadi baik guru, kepala sekolah maupun sarana prasarana. Itulah yang tampaknya belum. Masih banyak sekolah zona tertentu yang fasilitas tidakimbang," ucapnya.

Proses Pendaftaran

Sekretaris Disdik Kota Jogja, Dedi Budiono, mengatakan siswa difabel yang kesulitan mendaftar akhirnya sudah bisa diselesaikan setelah ada surat dari Disdikpora DIY. Surat itu menerangkan yang bersangkutan terlambat mendapatkan nilainya, sehingga Disdik bisa melanjutkan proses pendaftarannya.

"Kalau tidak ada landasannya kami juga repot, perwal dilanggar, juknis dilanggar. Tapi kalau ini kan ada landasan hukum yang lain, dari yang lebih tinggi juga, karena adanya keterlambatan keluarnya nilai. Karena di sana ada kesalahan dan bukan kesalahan anaknya," kata dia.

Komisioner Bidang Pemantauan

dan Pelayanan Pengaduan Komite Disabilitas DIY, Winarta, mengatakan banyak difabel yang terancam gagal mendaftar karena nilainya terlambat keluar.

"Baru pagi tadi [keluar nilai], kesempatannya kecil sekali, dia harus mobilitas ke sekolahnya dan sebagainya. Jadi terkait dengan kasus ini kami sedang membicarakan dengan Disdik Kota agar ada jalan keluar dan Disdik DIY harus bertanggung jawab supaya ini tidak gagal," ujarnya.

Ketua Forum Pengawas Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharudin Kamba, mengatakan hal yang dialami siswi difabel ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es. "Bisa jadi masih banyak kasus di luar sana," ungkapnya.

Di luar itu, ia mengapresiasi respons cepat Disdik Kota Jogja untuk bisa melanjutkan proses pendaftaran siswa difabel. Ia berharap ke depan jadwal pembagian SKHUN bisa serentak antara siswa umum maupun difabel. "Jangan ada lagi diskriminasi terhadap siswa difabel," katanya.

KMS

Sejumlah kuota KMS di sekolah negeri di Kota Jogja dibiarkan kosong dan digunakan peserta jalur zonasi mutu. Kekosongan ini terjadi karena peserta pemegang KMS telah lebih dahulu memilih jalur zonasi jarak.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Budi Asrori menjelaskan, peserta KMS memilih ikut zonasi jarak karena menjadi jalur yang bisa memberikan mereka kepastian untuk diterima sekolah pilihan.

Sisa kursi siswa KMS yang kosong,

diisi oleh anak dari zonasi mutu.

Budi tidak dapat memastikan daya tampung seluruh SMP di Kota Jogja akan terpenuhi. Namun, hal itu tidak menjadi masalah, KBM akan tetap berjalan walaupun siswa di kelas tidak sesuai rombel.

Kepala SMPN 1 Jogja, Niken Sasanti mengungkapkan seluruh kuota peserta PPDB 2019 di sekolahnya terisi penuh. Mulai dari bibit unggul sebanyak 27 siswa, zonasi wilayah 82 siswa, zonasi mutu 121 siswa, luar zonasi 14 siswa, satu orang jalur perpindahan orang tua, hingga KMS 27 siswa.

"Jumlah total 272 siswa," kata dia.

Humas dan Informasi PPDB 2019 SMPN 5 Jogja, Sujiyana menerangkan, kuota siswa KMS 32 orang bukan hanya terisi oleh tujuh siswa KMS yang mendaftar langsung ke sekolah. Melainkan juga enam siswa KMS "lemparan" dari sekolah lain dan tujuh siswa zonasi mutu.

"Siswa KMS yang berasal dari lemparan sekolah lain, akan kami wawancarai. Untuk mengetahui apakah mereka benar-benar sudah paham dengan sistem pendidikan di SMPN 5 Jogja," kata dia.

Ia menambahkan kuota KMS masih ada yang dibiarkan kosong dikarenakan siswa KMS biasanya mencari sekolah lewat jalur zonasi jarak. Notabene sekolah tersebut dekat dengan rumah mereka, sehingga dinilai lebih irit biaya.

Ia menyebutkan sejumlah peserta KMS yang mendaftarkan diri ke SMPN 5 Jogja atas minat sendiri, memiliki nilai cukup baik dan diperkirakan memiliki potensi yang masih bisa dioptimalkan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005